

TAJUK RENCANA

10 Tahun UUK DIY

RABU 31 Agustus mendatang, genap 10 tahun lahirnya Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK DIY). Menandai peringatan satu dasawarsa UUK DIY, antara lain digelar Seminar Nasional Lahirnya UUK: Berkaca dari Sejarah, Menuju Masyarakat Sejahtera, Senin (22/8) lalu di Royal Amabarrukmo Yogyakarta. Seminar diselenggarakan Paniradya Kaistimewan DIY bersama Sekber Keistimewaan DIY.

Seperti diungkapkan Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY, Aris Eko Nugroho SP Msi dalam sambutannya, Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK DIY) 31 Agustus 2012 dan kemudian mengundangkannya pada 3 September 2012.

Sementara itu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutan yang dibacakan Wakil Gubernur DIY Paku Alam X mengungkapkan, Undang Undang Keistimewaan lahir dari peristiwa bersejarah saat Yogya di bawah pemerintahan dua kerajaan *mardika* me-’mandat’-kan diri bergabung dengan RI yang masih muda. Proses ini layaknya *ijab-kabul*, ikatan batin sehidup-semati di antara dua pihak setara yang tidak bisa diputus secara sepihak.

Dalam sejarah bangsa, kata Gubernur DIY, Yogyakarta juga merupakan keteladanan sikap dan keberpihakan terhadap NKRI. Pada periode sebelum Indonesia merdeka, Yogya adalah *nagari mardika*, yang sebenarnya memiliki syarat-syarat menjadi negara berdaulat penuh. Sebab, Yogyakarta punya rakyat, punya wilayah

kekuasaan, dan punya pemerintahan yang diakui oleh negara luar.

Namun dalam perjalanannya, Ngayogyakarta, yang secara sistem pemerintahan sudah bisa membuat negara sendiri, melalui ketokohan Sri Sultan HB IX dan Sri PA VIII, memutuskan bergabung dengan NKRI. Integrasi ini kian tegas, ketika pada 18 Agustus 1945, Sri Sultan HB IX mengirim surat kawat kepada Presiden Soekarno yang menegaskan sikap politiknya itu. Sehari kemudian, Soekarno memberikan piagam penetapan kepada Yogya sebagai Daerah Istimewa setingkat provinsi.

Menurut Sri Dultan, menjelang Satu Dasawarsa berlakunya Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY ini sudah selayaknya dilakukan refleksi sebagai sarana *nitilakunanting laku*, menentukan apa yang akan dilakukan guna memperkuat eksistensi keistimewaan demi sebesar-besarnya menyejahterakan masyarakat.

Salah satu narasumber, Paulus Yohanes Sumino mengatakan, di Indonesia yang memiliki keistimewaan seperti DIY hanyalah DIY. Sebab menurutnya, yang istimewa adalah kedudukan hukum DIY dalam konstruksi hukum NKRI. Kedudukan hukum yang istimewa itu diperoleh karena DIY hadir pada momentum penting pembentukan NKRI.

Karena peran penting Yogyakarta di seputar Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 memang selayaknya Yogyakarta kemudian mendapatkan keistimewaan. Satu dasawarsa UUK DIY juga sangat layak dijadikan momentum untuk lebih menyejahterahkan masyarakat DIY. □

Ketangguhan Hadapi Krisis Pangan

Moch Sholeh Pratama

bisa tercapai apabila lumbung pangan di daratan dan lautan mampu memproduksi secara optimal.

Indonesia disebut negara agraris karena mayoritas masyarakatnya bekerja di bidang pertanian. Aktivitas produksi pertanian Indonesia didukung oleh ketersediaan lahan, dan keanekaraga-



KR-JOKO SANTOSO

man jenis tanaman pangan. Indonesia memiliki tanah pertanian yang luas nan subur sehingga tepat untuk bercocok tanam. Selain itu, hasil pertanian Indonesia pun beragam antara lain umbi-umbian, kacang-kacangan dan biji-bijian (sereal). LHasil produksi sereal Indonesia bahkan belakangan memperoleh pengakuan internasional. International Rice Research Institute (IRRC) memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi karena Indonesia berhasil capai swasembada beras tahun 2019-2021.

Agraris-Maritim

Selain itu, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia juga memiliki potensi maritim yang tak kalah melimpah. Perairan Indonesia adalah lumbung pangan berbasis kemaritiman

yang menghasilkan sumber pangan seperti ikan dan rumput laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (2022) memprediksi potensi tangkapan ikan sebanyak 12,01 ton dan target produksi rumput laut di akhir tahun sebesar 11,85 juta ton. Potensi besar produksi ikan dan rumput laut adalah sumber pangan sehat bagi masyarakat. Produksi sumber pangan dari sektor maritim tentunya tak kalah penting dalam menopang ketahanan pangan nasional.

Sayangnya, sektor maritim sebagai lumbung pangan berbasis kelautan belum memperoleh banyak perhatian. Karena itu, momentum krisis pangan ini harus dijadikan pelecut untuk kembali membangkitkan gagasan Revolusi Biru yang sempat dicanangkan Presiden Jokowi. Yakni menguatkan produksi perikanan dan kelautan dengan akselerasi implementasi minapolitan (modernisasi perikanan).

Potensi di sektor agraris dan maritim harus dilihat sebagai kapital besar Indonesia dalam menghadapi krisis pangan. Apabila potensi keduanya dikelola dengan optimal maka secara langsung menguatkan ketahanan pangan nasional. Akhirnya dapat dipahami bahwa kunci ketangguhan Indonesia menghadapi krisis pangan dunia adalah dengan mengoptimalkan produksi pangan di daratan dan lautan. □

*) *Moch Sholeh Pratama, Mahasiswa Magister Sejarah Universitas Gadjah Mada*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opini-kr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Mengembalikan Spirit PBAK

Fathorrahman Ghufron

mahasiswa baru dengan nalar mosi tak percaya kepada pimpinan institusi pendidikan. Bahkan, secara emosional, menganggap pimpinan institusi melakukan penyumbatan informasi tentang skema pembiayaan pendidikan yang dianggap memberatkan.

Skema pembiayaan pendidikan berbasis Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2013 pasal 1 ayat (3) menekankan pada kondisi ekonomi orang tua. Konsekwensinya, semakin tinggi penghasilan orang tua, maka semakin tinggi juga nilai UKT-nya. Akan tetapi, ketika ada orang tua yang kondisi ekonominya rendah, maka rendah pula nilai UKT-nya.

Bahkan, untuk mengatasi persoalan lain ketika ada orang tuang yang merasa keberatan membayar UKT yan sudah ditentukan, setiap perguruan tinggi menerapkan kearifan lokal dengan cara banding UKT. Sehingga, setiap mahasiswa yang dalam perjalanannya tidak lagi mempunyai kemampuan membayar uang pendidikan, bisa tetap melangsungkan proses belajarnya di perguruan tinggi.

Secara sosiologis, penentuan UKT yang dalam skema pembiayaan pendidikan perguruan tinggi sebenarnya menganut sistem distribusi silang. Di mana, pemerintah memfasilitasi prinsip saling kerja sama (*ta’awun*) agar orang tua yang bertaraf ekonomi tinggi mau membantu pihak yang bertaraf ekonomi rendah. Dalam model distribusi silang seperti ini, model UKT berupaya mene-

gakkan asas keadilan.

Nasional

Namun, kebijakan UKT yang diberlakukan secara nasional sejak tahun 2013 ini dipelintir sedemikian rupa. Seolah-olah UKT merupakan proyek komersialisasi yang tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk kuliah. Dampaknya, PBAK menjadi arena kekerasan simbolik, dan mengindoktrinasi mahasiswa baru agar etidak percaya kepada pimpinan perguruan tinggi.

Untuk mengatasi ëreportoir kekerasan simbolik, beberapa kampus pun melakukan pelibatan otoritas kepemimpinan untuk mencegah terjadinya ëkemudaratatan akademik. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh UIN Suka yang membatasi kegiatan PBAK. Namun, dalam membatasi PBAK tidak mengurangi substansi kegiatan intinya sebagai sarana pengenalan iklim kampus yang mencerahkan dan mendidik. □

*) *Fathorrahman Ghufron, Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fak Saintek UIN Sunan Kalijaga.*

Pojok KR

Pembebasan lahan Proyek Tol Yogyakarta-Kulonprogo mencapai Rp 3,40 triliun. -- Wow...

JFW 2022 dorong wujudkan Jogja menjadi pusat industri fashion. -- Sangat layak.

Korlantas Polri usulkan penghapusan BBNKB dan pajak progresif. -- Setuju.

Beraksi

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
@ pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Pasar Kangen Bikin Kangen

TERGODA viralnya video Pasar Kangen Jogja (PKJ), membuat saya berusaha datang ke Yogya untuk melihat PKJ. Berdua dengan teman naik sepeda motor dan sampadi tempat sekitar 12.30. Jadwal memang baru dibuka pukul 13.00. Karena gerbang juga sudah dibuka dan pengunjung mulai lalu-lalang, saya akhirnya masuk. Namun saya belum berkeliling malah duduk di pinggir melapas lelah.

Ini yang membuat saya kagum. Resmi memang dibukanya pukul 13.00, Tapi beberapa pedagang

saya lihat ketika datang sudah siap. Dan pengunjung seperti tidak sabar, apa yang ada langsung dibeli, disantap. Usai makan, dengan tertib membuang dos, streo-foam tempat makana, piring kertas kecil, gelas sekali pakai dan lainnya ke tempat sampah yang disediakan di pelbagai tempat. Tertib, bersih dan tidak membuat pemandangan rusak.

Saya kagum. Ini menarik. Pedagang taat pengunjung tertib. Pasar Kangen Jogja benar-benar bikin kangen. □

Eni, Tugu Lilin Surakarta

Yogya itu Istimewa, Bisa Ditata

SETELAH melihat Alun-alun Lor yang sekarang rapih meski terkesan panas dan gersang, beberapa pekan lau saya melihat Alun-alun Kidul saya merasa seperti jadi kumuh. Tiba-tiba tanpa sengaja saya mengumgum : “Kapan ya Alun-alun Kidul jadi indah seperti Alun-alun Lor?”

Rupa-rupanya driver online yang mengantar kami berkeliling mendengar gumanan tersebut. Spontan dia menjawab : "Mungkin kakilima dia menjawab : "Mungkin kakilima itu ditata, jadi kawasan ini akan tampak bersih. Sekarang ini karena kakilima-nya tidak beratu-

ran, kumuh rasanya," Katanya sambil menunjuk warung makan yang ada di salah satu trotoar.

Bapak itupun berkata lagi: Yogya itu istimewa, semua pasti bisa ditata. Bahkan itu pedagang kakilima di Malioboro yang sudah puluhan tahun bahkan membiayai sekolah anak dari kakilima Malioboro pun bisa dipindah tanpa gejolak. Yang lain pastilah bisa.

Saya hanya bisa mengangguk dan tersenyum. Memang Yogya istimewa. □

Affiah, wisatawan dari Purworejo

BARU-BARU ini UIN Sunan Kaliaga (UIN Suka) sudah menyelenggarakan Perkenalan Budaya Akademik dan Kampus (PBAK) dengan terkendali. Di dalam pelaksanaan PBAK (18-20 Agustus 2022) terdapat berbagai dinamika yang sangat menarik dijadikan sebagai pelajaran berharga. Dalam pelaksanaannya terdapat keterlibatan berbagai pihak yang saling bersinergi. Salah satu simpul penting yang terlibat dan menjadi *trigger* kesuksesan PBAK adalah mahasiswa.

Keberadaan mahasiswa yang sejak dahulu menjadi entitas penting dalam bangunan civitas akademika UIN Suka, terlibat dalam penyiapan dan pelaksanaan berbagai kegiatan akademik dan non-akademik seperti PBAK. Dalam menentukan komposisi acara, tema, dan kegiatan lainnya mahasiswa mempunyai nalar yang memadai dalam menentukan setiap bentuk dan formulanya.

Bahkan, di setiap prosesnya terdapat ruang interrelasi yang dialektis antara ketua panitia dari unsur dosen dengan ketua pelaksana dari unsur Mahasiswa. Pada titik ini, berbagai pihak yang terlibat mempunyai harapan bersama bahwa PBAK tahun 2022 akan menjadi titik masuk tumbuhnya penyegaran spirit akademik yang santun dan beradab.

Problem Indoktrinasi

Akan tetapi, ketika PBAK masuk dalam tahap pelaksanaan terdapat persoalan substantif yang nyaris melepaskan spirit PBAK dari jangkar nilainya. PBAK yang sejatinya menjadi ruang edukatif dan medan pencerahan bagi mahasiswa baru, sebagaimana diamanatkan dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4962 tahun 201 tentang pedoman umum PBAK, mulai bergeser pada ruang indoktrinatif yang ëmenyesatkan. Salah satu indikasi yang paling kentara adalah, ketika dominasi peran yang dilakukan senior dalam menginfiltrasi

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-PB Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerbit: Drs H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggung-jawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio** : KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No 62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552, Wakil : Drs M Thoha.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd, Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP